



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG
PENUGASAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DI LUAR STRUKTUR ORGANISASI
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pedoman administrasi mengenai penugasan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di luar struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan pembinaan karier bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melaksanakan penugasan di luar struktur organisasi Polri, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Peraturan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk Menduduki Jabatan Struktural;
3. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
4. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENUGASAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI LUAR STRUKTUR ORGANISASI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dan lampiran dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Masa penugasan anggota Polri di dalam negeri dilaksanakan berdasarkan kepentingan organisasi Polri dan kebutuhan organisasi pengguna dan atau pembinaan karier.
- (2) Dalam hal pengembalian penugasan anggota Polri, dilaksanakan setelah adanya koordinasi pimpinan organisasi pengguna dengan pimpinan Polri.
- (3) Kapolri dapat mendelegasikan kewenangan persetujuan perpanjangan kepada Kapolda untuk penugasan di tingkat Polda.

2. Ketentuan

2. Ketentuan lampiran Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2014

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

Drs. SUTARMAN
JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1014

Paraf :

1. As SDM Kapolri :
2. Kadivkum Polri :
3. Kasetum Polri :
4. Wakapolri :



LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG
PENUGASAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DI LUAR STRUKTUR ORGANISASI
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DAFTAR LAMPIRAN

- A. TABEL KESETARAAN ESELON, KEPANGKATAN, DAN GOLONGAN/
RUANG POLRI DENGAN DI LUAR STRUKTUR ORGANISASI POLRI;
- B. TETAP;
- C. PENGISIAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DALAM PENUGASAN
DI LUAR STRUKTUR ORGANISASI POLRI;

A. TABEL

A. TABEL KESETARAAN ESELON, KEPANGKATAN, DAN GOLONGAN/RUANG POLRI DENGAN DI LUAR STRUKTUR ORGANISASI POLRI

STRUKTUR ORGANISASI POLRI				DI LUAR STRUKTUR ORGANISASI POLRI		
NO	ESELON	JENJANG PANGKAT	GOL/RUANG	ESELON	JENJANG PANGKAT	GOL/RUANG
1	2	3	4	5	6	7
1	I.a	Komjen/ Irjen	IV/f	I.a	Pembina Utama	IV/e
2	I.b	Irjen	IV/e	I.b	Pembina Utama	IV/e
3	II.a	Brigjen	IV/d	II.a	Pembina Utama Madya	IV/d
4	II.b	Kombes	IV/c	II.b	Pembina Utama Muda	IV/c
5	III.a	AKBP	IV/b	III.a	Pembina Tk I	IV/b
6	III.b	Kompol	IV/a	III.b	Pembina	IV/a
7	IV.a	AKP	III/c	IV.a	Penata Tk I	III/d
8				IV.a	Penata	III/c
9	IV.b	Iptu	III/b	IV.b	Penata Muda Tk I	III/b
10	IV.b	Ipda	III/a	V.a	Penata Muda	III/a

B. TETAP.....

B. TETAP;

C. TABEL PENGISIAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DALAM PENUGASAN DI LUAR STRUKTUR ORGANISASI POLRI

<p>1. Jabatan Eselon I.a dijabat oleh Inspektur Jenderal Polisi dengan pengecualian sebagai berikut:</p> <p>a. jabatan berpangkat Komjen Pol, untuk penugasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Wakil Gubernur dan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI; 2) Sekretaris Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Sesmenkoplhukum) RI; 3) Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemenhan) RI; 4) Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI; 5) Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sekjen Wantannas) RI; 6) Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Irjen Kemenhan) RI; 7) Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Kalakhar Bakorkamla) RI; 8) Kepala Badan SAR Nasional (Kabasarnas) RI; dan 9) Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI; <p>b. jabatan berpangkat Brigjen Pol, untuk penugasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) di bawah Kepala Lemsaneg; dan 2) Sekretaris Pribadi (Sespri) Presiden RI atau Staf Ahli Presiden. <p>2. Jabatan Eselon I.b dijabat oleh Inspektur Jenderal Polisi kecuali penugasan di lingkungan Lemsaneg dijabat oleh Brigadir Jenderal Polisi.</p> <p>3. Jabatan Eselon II.a dijabat oleh Brigadir Jenderal Polisi dengan pengecualian terdapat penugasan yang dijabat oleh Komisaris Besar Polisi untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. di lingkungan Lemsaneg; b. Kepala BNN Provinsi di wilayah Polda tipe "B"; c. Asisten Sespri Presiden RI; dan d. Analis Kebijakan pada Set Wantannas RI. <p style="text-align: right;">4. Jabatan</p>

4. Jabatan Eselon II.b dijabat oleh Komisaris Besar Polisi.
5. Jabatan Eselon III.a dijabat oleh Komisaris Besar Polisi dengan pengecualian terdapat penugasan yang dijabat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi untuk:
 - a. di lingkungan Lemsaneg;
 - b. Kepala BNN Kabupaten/Kota;
 - c. di lingkungan BNN Provinsi.
6. Jabatan Eselon IV.a dijabat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi/Komisaris Polisi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

2014

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Drs. SUTARMAN
JENDERAL POLISI